

**ANALISIS BELANJA DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN  
(STUDI EMPIRIS KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA BARAT)**

**Deviani**

**Universitas Negeri Padang  
devisyafei@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*The Purpose of this research is to examine directly effect variables Local government Expenditure on economic growth, to examine directly effect economic growth on education also to examine indirectly effect Local government Expenditure variables on education. The samples of study are region expense budget in 2006 – 2008 at 19 municipal. The result of study with regression indicate that variables Local government Expenditure namely growth of capital expenditure ratio have positive significantly effect on economic growth, but municipal contribution ratio directly have negatif significantly effect on economic growth, while capital expenditure ratio directly have not significantly effect on economic growth. Economic growth directly have not significantly effect on education.*

*Keyword: Local goverment expenditure, economic growth and education*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerahnya secara efisien dan efektif sehingga tujuan desentralisasi maupun tujuan daerah yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendidikan yang semakin baik dapat dicapai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puji Wibowo (2008) terhadap 29 propinsi di Indonesia menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah.

Salah satu alat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan daerah (Mahmudi, 2007). Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk pengambilan keputusan yang berkualitas sehingga keputusan diambil berdasarkan pada pertimbangan rasional ekonomik tidak berdasarkan pertimbangan intuisi politik atau emosional.

Analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan (Mahmudi, 2007). Analisis belanja dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio

keuangan yang dimiliki suatu Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya (Abdul Halim, 2002).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Penelitian Armin (2005) yang dilakukan terhadap pemerintahan daerah di Indonesia menyatakan bahwa belanja atau pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan propinsi propinsi di Indonesia. Dan pengeluaran pembangunan memberikan pengaruh yang lebih besar dari pengeluaran rutin. Begitu juga (Alexiou,2009) yang melakukan penelitian terhadap negara negara di *South Eastern Europe* (SEE) menyatakan pengeluaran modal, pengeluaran pembangunan dan pengeluaran investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Osborn,(2007) pada 30 negara berkembang menyatakan bahwa Pengeluaran modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran rutin berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Loizides (2005) juga menyatakan dalam penelitiannya di negara Greece, United Kingdom dan Ireland bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh David de la Croix, et.al (2008) di Swedia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendidikan sebanyak 20%.

Melihat data belanja/ pengeluaran beberapa pemerintah daerah di Sumatera Barat,data PDRB dan data indikator pemerataan pendidikan berupa angka partisipasi murni (APM) beberapa daerah di Sumbar (tabel 1), penulis ingin menguji apakah belanja yang dilakukan pemerintah daerah telah mencapai tujuan tujuan desentralisasi seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pendidikan.

**Tabel 1**  
**Belanja Modal Pelayanan Publik (BMPP), PDRB Per Capita dan APM**

KOTA/Kab	Bmpp 2006 (m)	PDRB 2006 (jt)	APM SD 2006(%)	Bmpp 2007 (m)	PDRB 2007 (jt)	APM SD 2007 (%)
Pessel	102,3	6,2	108.	142	7.07	9847
Kab Solok	61,1	8.3	91.2	104	9.73	98.7
Kab Pasaman	72,2.	7.7	96.	108	8.83	96.1
kota Pariaman	109.7.	14.5	94.9	108	16	100.7

Sumber: diolah dari LHP BPK, BPS dan DISDIK Pemda Sumbar

Dari tabel 1 terlihat pada tahun 2006 pemerintah daerah kabupaten Solok merealisasikan belanja modal sebesar Rp 61 milyar dengan PDRB per capita di daerah tersebut sebesar Rp 6 juta dan APM 91%. Selanjutnya pada tahun 2007

realisasi belanja modal sebesar Rp 104 milyar dengan PDRB per capita di daerah tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 9 juta lebih dan APM 98%. Hal ini juga terlihat di pemerintah daerah kabupaten Pasaman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penelitian bagi penulis apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:1) pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan, 3) pengaruh belanja daerah secara tidak langsung terhadap pendidikan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal yang telah terujud dalam bentuk keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan dana desentralisasi semestinya mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi tugas/fungsi daerah. Diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya. Investasi yang dilaksanakan pemerintah melalui belanja modal berkontribusi pada perekonomian regional, setidaknya dalam dua tahap. Dalam jangka pendek melalui belanja material dan penyerapan tenaga kerja dan dalam jangka panjang melalui angka pengganda pada sektor swasta yang turut berperan dalam perekonomian.

Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Studi yang menunjukkan hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diantaranya: Barro dan Salla-I Martin (1995) dalam Osborn (2007) yang membagi pengeluaran pemerintah menjadi pengeluaran produktif dan tidak produktif. Pengeluaran produktif apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi mengasumsikan semua pengeluaran pemerintah bersifat produktif (Barro,1991) dalam Alexiou (2009) dan Landau (1985) dalam Osborn (2007) meneliti 27 negara

berkembang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar terutama pengeluaran konsumsi justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Hasil yang sama ditemukan oleh Landau (1986) dalam Osborn terhadap 65 negara berkembang. Devarajan (1996) menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dengan pertumbuhan. Sementara itu Grier (1989) dalam Alexiou (2009) menyatakan pengeluaran nonproduktif mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan di negara industri tetapi positif dan signifikan di negara berkembang. Hal ini terjadi karena pelayanan pemerintah yang bersifat non produktif di negara berkembang sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Josaphat P Kweka dan Oliver Morrissey (1999) dalam Alfirman meneliti hubungan keduanya terhadap Negara Tanzania periode 1965 s.d 1996.

Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan (Grier dan Tullock,1989, Barro,1991) dalam Alexiou. Studi terhadap negara-negara maju juga meyimpulkan hasil yang sama seperti Hannson dan Henrekson (1994). Pada mayoritas studi, pengeluaran pemerintah total mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan (Romer,1990;Folster dan Henrekson,2001) dalam Alexiou. Folster dan Henrekson mengatakan bahwa pada tingkat pengeluaran pemerintah yang rendah di negara miskin terutama untuk pengeluaran produktif dan rendah pula pajaknya, biasanya tidak efisien dalam pengumpulan pajak dan pengeluaran pemerintahnya.

Studi yang menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diantaranya: Alfranca (2003) dan Alexiou (2009) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Kelly (1997) menyatakan bahwa pengeluaran sosial mempunyai hubungan positif yang signifikan dan pengeluaran investasi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana. Osborn(2007) menyatakan pengeluaran modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran rutin berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Steven A.Y.Lin (1994) dalam Alfirman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain Armin (2005) yang melakukan penelitian terhadap seluruh propinsi di Indonesia ,Alfirman (2006) melakukan studi terhadap pengeluaran pemerintah dari tahun 1970 -2003.Samie (2008) melakukan penelitian di kota Ambon untuk tahun 1992- 2006 menyatakan pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai dampak tdk tingkat pertumbuhan ekonomi.

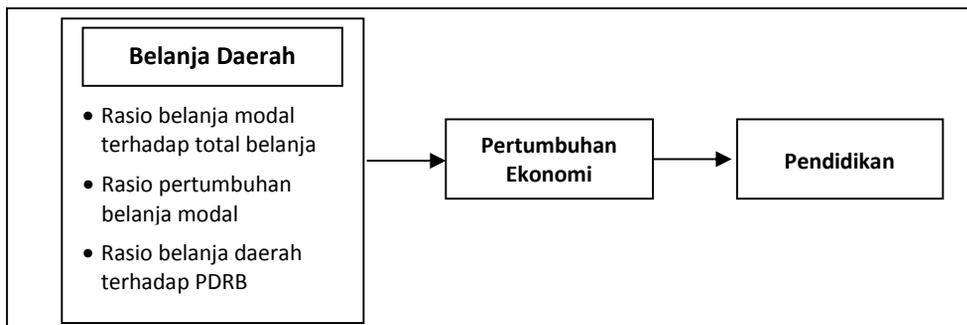
### **Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan**

Hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan timbal balik .Pendidikan digambarkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan masyarakat karena perolehan pendapatan seseorang mempengaruhi pencapaian pendidikan anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena dengan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan pendapatan per capita masyarakat ,

selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan .

UNDP dalam Human Development Report nya (2007) melaporkan bahwa ada kecenderungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah. Pada tahun 2005, tingkat melek huruf di Indonesia sebesar 90,4%, tingkat partisipasi sekolah 68,2% dan PDB perkapita US \$ 3.843. Di Singapura, PDB per kapita relatif tinggi yaitu sebesar US \$ 29.663, dan tingkat melek huruf serta partisipasi sekolahnya berturut-turut 92,5% dan 87,3%. Sedangkan di Malaysia, PDB per kapitanya sebesar US \$ 10.882 dengan tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah sebesar 88,7% dan 74,3%. Secara rata-rata PDB per kapita di Asia Timur dan Pasifik sebesar US \$ 6.604, dengan tingkat melek huruf 90,7% dan partisipasi sekolah 69,4%. Angka-angka ini relatif tinggi dibandingkan rata-rata di Sub-Sahara Afrika di mana PDB per kapitanya hanya US \$ 1.998, tingkat melek huruf 60,3% dan partisipasi sekolah 50,6%. Semakin tingginya PDB per kapita juga diikuti oleh semakin membaiknya kualitas hidup, yang tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM).

Penelitian yang dilakukan oleh David, et,al (2008) di Swedia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendidikan sebanyak 20%. Hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari masalah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan diikuti dengan semakin baiknya pula pendapatan masyarakat sehingga masyarakat akan mudah dalam mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendidikan. Berdasarkan uraian diatas dikemukakan hubungan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Hubungan Antar Variabel Penelitian**

## METODE PENELITIAN

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang berjumlah 19 kota kabupaten dan terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten.

### Data dan Sumber Data

Jenis Data adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, data PDRB per capita dan data APM (tingkat partisipasi murni memasuki pendidikan). Dilihat dari segi sifatnya, data yang digunakan merupakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka. Berdasarkan waktu pengumpulannya maka dalam penelitian ini data digolongkan pada *time series-cross section (pooling data)*. Data dalam penelitian ini diperoleh

melalui dinas atau instansi yang terkait, yaitu Dinas pendidikan, BPS serta situs-situs BPK, Departemen pendidikan dan Departemen keuangan.

**Tabel 2**  
**Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**

No	Nama Kota dan Kabupaten	No	Nama Kota dan Kabupaten
1	KAB Agam	11	Kab Solok Selatan
2	KAB Pasaman	12	Kota Pariaman
3	KAB 50 Kota	13	Kab Kep Mentawai
4	Kota Bukittinggi	14	Kota Solok
5	Kota Padang	15	Kota Payakumbuh
6	Kota Padang Panjang	16	Kab Pesisir Selatan
7	KAB Sijunjung	17	Kab Tanah Datar
8	KAB Dharmasraya	18	Kab Solok
9	Kota Sawahlunto	19	Kab Padang Pariaman
10	Kab Pasaman Barat		

### Operasional dan Pengukuran Variabel

**Tabel: 3**  
**Operasional dan Pengukuran Variabel**

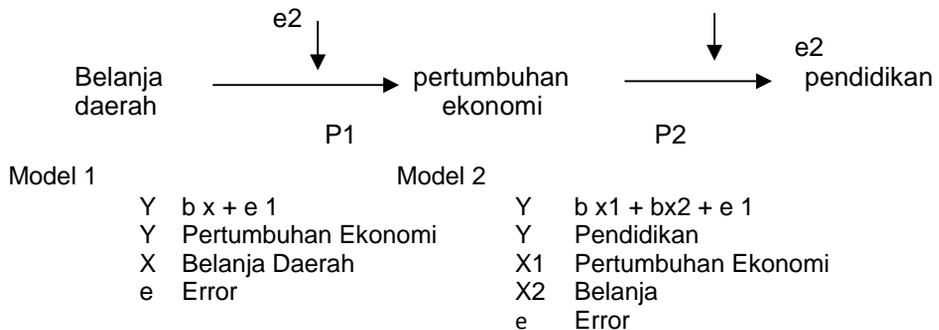
Variabel	Pengukuran	Keterangan
<b>Belanja</b> Belanja adalah pengelolaan belanja daerah yang diukur dengan menggunakan rasio belanja modal, rasio belanja daerah terhadap PDRB dan rasio pertumbuhan belanja modal. Penggunaan rasio belanja modal dikarenakan Indikator ini menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah pada manfaat jangka panjang, sehingga memberikan multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian.	Rasio belanja modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), (2008) sebagai indikator keuangan pemerintah daerah (UNDP), (2008)
	Rasio belanja daerah terhadap PDRB = $\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$	
	Rasio pertumbuhan belanja modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal th t} - \text{Realisasi Belanja Modal th t-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal th t-1}}$	Mahmudi (2007)
<b>Pertumbuhan ekonomi</b> Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan per kapita (PDRB per capita)	PDRB/capita saat ini dikurangi dengan PDRB/capita sebelumnya dibagi dengan PDRB/capita sebelumnya.	OSBORN (2007) dan indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan
<b>Pendidikan</b> Pendidikan adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal yang diukur dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar.	Angka Partisipasi Murni (APM) = jumlah siswa atau penduduk usia sekolah <u>Yang sedang bersekolah</u> $\frac{\text{Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut}}$	Indikator yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dalam menilai kemampuan masyarakat mengakses pendidikan

### Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka metode analisis yang digunakan adalah :

1. Statistik deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik (Ghozali,2009)
  - a) Multikolinearitas
  - b) Normalitas
  - c) Heterokedastisitas
  - d) Uji Autokorelasi (Durbin-Waston)
3. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian.



Untuk melihat pengaruh tidak langsung antara belanja daerah dengan pendidikan diperoleh dengan mengalikan koefesien jalur P1 dengan koefesien jalur P2.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh didapat deskripsi statistik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Sd.Dn
pertmbuhan.ekonomi	37	.08	.18	.02901
r.pertbh.belanja modal	37	-.19	1.75	.35032
Ratio .belanja.modal	37	.14	.44	.07424
pendidikan	37	.86	1.12	.06243
Ratio kontribusi pmth	37	.07	.67	.15248
Valid N (listwise)	37			

Sumber : Olahan Data sekunder

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *kolmogorov smirnov* pada  $\alpha = 0,05$ . Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikan semua variabel lebih besar dari 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal.

**Tabel 5**  
**Uji Normalitas**

Variabel Penelitian	Asymp. Sig (2-tailed)
ratio. Pertumbuhan Belanja modal	0.635
Ratio Belanja modal	0.969
Ratio Belanja thd pdrb	0.648
Pertumbuhan .ekonomi	0.711
Pendidikan	0.246

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas didapatkan tidak ada variabel independen yang menunjukkan nilai tolerance kurang dari 0.10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih dari 10 (Ghozali.2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

**Tabel 6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
Ratio. Pertumbuhan Belanja modal	.820	1.220
Ratio Belanja modal	.839	1.192
Ratio Belanja thd pdrb	.958	1.044

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk melihat perbedaan varians residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas pada suatu model, Pada model pertama (1) dimana Pertumbuhan Ekonomi = f ( Ratio Pertumbuhan Belanja Modal, Ratio Belanja Modal , Ratio Realisasi Belanja Terhadap PDRB) Pada model kedua (2) dimana Pendidikan = f ( Ratio Pertumbuhan Belanja Modal, Ratio Belanja Modal , Ratio Realisasi Belanja Terhadap PDRB, pertumbuhan Ekonomi) dapat dilihat pada lampiran

Berdasarkan pola scatterplot diketahui bahwa titik penyebaran menyebar dan tidak mengumpul hanya pada satu tempat. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model pertama dan kedua tidak ada masalah heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Uji ini diperlukan apabila data yang digunakan adalah time series. Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi berarti ada problema Autokorelasi. Model yang baik harus bebas dari Autokorelasi. Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 7.

Dari Tabel 7 dapat diketahui nilai DW berada diantara -2 dan 2 berarti tidak ada terjadi autokorelasi.

**Tabel 7**  
**Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)**

Model	Durbin-Watson
pertama	1.133
kedua	1.367

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil olahan data dengan bantuan SPSS dapat dilihat hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) seperti yang tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi (Model Summary(b))**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.573(a)	.328	.267	.02484	1.133

- a Predictors: (Constant), ratio.pertumbuhan.belanja.modal, ratio.belanja.modal, ratio belanja terhadap drb  
b Dependent Variable: pertumbuhan.ekonomi

Pada Table 8 diatas dapat dilihat nilai R Square sebesar 0.328 yang berarti kontribusi ratio pertumbuhan belanja modal, ratio belanja modal dan ratio belanja modal thd pdrb terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 32,8% sedangkan 67,2% ditentukan oleh factor lain diluar model.

### Uji Hipotesis

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Dimana analisis jalur bertujuan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda dan berguna untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel.

**Hipotesis 1: Belanja daerah berupa ratio pertumbuhan belanja modal, ratio belanja modal dan ratio belanja terhadap PDRB secara bersama sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi**

Dari hasil olahan data dapat dilihat hasil uji F seperti yang tertera dalam tabel 9 berikut:

**Tabel 9**  
**Uji F dengan ANOVA(b)**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.010	3	.003	5.365	.004(a)
Residual	.020	33	.001		
Total	.030	36			

- a. Predictors:constant),ratio.pertumbuhan.belanja.modal,ratio.belanja.modal,ratio belanja terhadap pdrb  
b. Dependent Variable: pertumbuhan.ekonomi

Hasil regresi uji model diatas dengan Anova menunjukkan bahwa model hipotesis menunjukkan bahwa model 1 baik digunakan untuk prediksi. semua variabel independen (ratio pertumbuhan belanja modal, ratio belanja modal dan ratio belanja terhadap PDRB) yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama sama terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebesar 0.004, sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual. Dan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa belanja modal berupa ratio pertumbuhan.belanja modal, ratio belanja modal dan ratio belanja terhadap PDRB secara bersama sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima.

Uji signifikansi individual (uji t) untuk model 1, hasil pengolahan data dengan uji t dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

**Tabel 10**  
**Pengujian hipotesis (Uji T) Coefficients(a)**

	Unstandardized Coefficients		Stdized Coeffnts	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	.133	.018		7.412	.000
Ratio belanja thd pdrb	-.089	.030	-.466	-2.953	.006
Ratio.belanja .modal	.101	.061	.258	1.653	.108
Ratio.pertumbuhan,.belanja.modal	.026	.012	.320	2.192	.036

a. Dependent Variable: pertumbuhan.ekonomi

Dengan menggunakan uji t didapatkan hasil bahwa variabel bebas berupa Ratio belanja terhadap pdrb dan ratio pertumbuhan belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikan pada 0 .006 dan 0.036 . bentuk hubungan untuk Ratio belanja terhadap pdrb dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif sedangkan ratio pertumbuhan belanja modal mempunyai hubungan yang positif. Sebaliknya Ratio belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Koefesien jalur masing masing variabel ( nilai standardized) adalah sebagai berikut:

1. Ratio belanja thd pdrb = -0.466,t hitung - 2.953. pada signifikan 0.006 < 0.05,artinya koefesien jalurnya signifikan
2. Ratio pertumbuhan belanja modal = 0.320, t hitung 2.192 pada signifikan 0.036 < dari 0.05, artinya koefesien jalurnya signifikan
3. Ratio belanja modal = 0.258 , t hitung 1,653 pada signifikan 0.108 artinya koefesien jalurnya tidak signifikan

### **Hipotesis 2: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Pendidikan.**

#### **Uji signifikasi simultan (uji F) untuk model 2**

Dari hasil olahan data dapat dilihat hasil uji F seperti yang tertera dalam tabel 11 berikut:

**Tabel 11**  
**ANOVA b)**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.012	4	.003	.765	.556
Residual	.128	32	.004		
Total	.140	36			

- a. Predictors:Constant),pertumbuhan.ekonomi,ratio.belanja.modal,ratio.pertumbuhan.belanja.modal, ratiobelanja modal thd pdrb  
b. Dependent Variable: pendidikan

Dari Table 11 diatas dapat dilihat semua variabel independen (ratio pertumbuhan belanja modal, ratio belanja modal, ratio belanja terhadap PDRB) yang dimasukan kedalam model tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama sama terhadap variabel dependen (pendidikan), sehingga model kedua tidak dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

### **Hipotesis 3 : Belanja Daerah Berupa Rasio Belanja Modal , Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Secara Tidak Langsung Berpengaruh Terhadap Pendidikan.**

Hasil dari uji model /persamaan 2 didapat hasil yang tidak signifikan, artinya belanja daerah berupa rasio belanja modal , rasio belanja daerah terhadap PDRB, rasio pertumbuhan belanja modal secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pendidikan.

## Pembahasan

### **Analisis Pengaruh Belanja ( ratio belanja terhadap PDRB, ratio belanja modal dan ratio pertumbuhan belanja modal) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa ratio belanja terhadap PDRB berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi . Tingkat signifikansi pengaruh ratio belanja terhadap PDRB lebih tinggi dari ratio pertumbuhan belanja modal dengan bentuk pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi . Ini berarti semakin tinggi ratio belanja terhadap PDRB akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Ratio belanja terhadap PDRB menggambarkan produktifitas dan efektifitas daerah dalam membelanjakan anggarannya ( UNDP,2007 ) Semakin rendah rasionya berarti semakin efektif pemerintah dalam membelanjakan anggarannya karena ratio belanja terhadap pdrb merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah tersebut dengan pendapatan domestik regional bruto daerah tersebut.

Hasil uji hipotesis terhadap ratio pertumbuhan belanja modal memperlihatkan hasil yang signifikan dengan arah hubungan yang positif pada pertumbuhan ekonomi . Ini berarti semakin tinggi ratio pertumbuhan belanja modal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi .

Temuan dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfranca (2003) dan ,Alexiou (2009) yang menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Osborn(2007) menyatakan pengeluaran modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran rutin berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang konsisten dengan temuan ini adalah Amin (2005), Alfirman(2006) dan Samie (2008) ). Armin (2005) dan ,Alfirman (2006) melakukan penelitian terhadap seluruh propinsi di Indonesia terhadap pengeluaran pemerintah dari tahun 1970 -2003. sementara Samie (2008) melakukan penelitian di kota Ambon untuk tahun 1992- 2006 menyatakan pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai dampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Steven A.Y.Lin dalam Alfirman (1994) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jhon Due (1968) dalam Alfirman bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat PDRB dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program pengeluaran pemerintah seperti pendidikan .Sementara Asep Adya Barata (2004) dalam Armin(2005) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat

Hasil uji hipotesis terhadap ratio belanja modal memperlihatkan hasil yang tidak signifikan dengan arah hubungan yang positif pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilaporkan dalam beberapa studi sebelumnya tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Osborn(2007), Alexiou(2009). Namun temuan penelitian ini mendukung penelitian Kelly (1997) menyatakan bahwa pengeluaran investasi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro dan Salla-I Martin (1995) dan Landau (1985) dalam Osborn (2007) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar terutama pengeluaran konsumsi justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Devarajan (1996) menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dengan pertumbuhan ekonomi.. Josaphat P

Kweka dan Oliver Morrisey (1999) dalam Alfirman meneliti hubungan keduanya terhadap Negara Tanzania periode 1965 s.d 1996. Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania.

Tidak signifikannya temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa porsi belanja modal di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat tidak mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan UNDP (2007) bahwa belanja modal membutuhkan waktu analisis yang lebih panjang dari lima tahun dan dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana.

Penjelasan lainnya adalah penemuan ini mengungkapkan adanya ketidakjelasan yang disertakan dalam program pertumbuhan ekonomi di kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefisienan dalam manajemen secara keseluruhan dari anggaran pemerintah daerah kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

### **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendidikan**

Uji statistik memperlihatkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendidikan. Hal ini mengindikasikan:

- 1) Pola konsumsi masyarakat yang tidak begitu memperhatikan pentingnya pendidikan atau ada faktor-faktor sosial lainnya yang menentukan kebutuhan individu akan pendidikan.
- 2) Pola belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah belum berpengaruh terhadap pendidikan masyarakat dalam jangka waktu yang pendek karena dampaknya akan kelihatan dalam waktu yang panjang.
- 3) Pendidikan sekolah dasar adalah program wajib belajar jadi walaupun pertumbuhan ekonomi memburuk program wajib belajar akan terus berjalan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan David, et,al (2008) di Swedia yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendidikan sebanyak 20% dan UNDP dalam Human Development Report nya (2007) yang melaporkan bahwa ada kecenderungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung Alcaro (1995) yang mengatakan korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun

Penjelasan lainnya adalah Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan akan memberikan dampak dalam jangka waktu yang panjang pula sementara data penelitian ini hanya 3 tahun.

Analisis Pengaruh Belanja Daerah Berupa Rasio belanja Belanja Modal, Rasio belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Secara Tidak Langsung Berpengaruh Terhadap Pendidikan

Tidak signifikannya hasil penelitian ini memberi arti bahwa belanja yang dilakukan pemerintah tidak mempengaruhi pendidikan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. atau pertumbuhan ekonomi tidaklah merupakan variabel intervening dari belanja daerah dan pendidikan. Selanjutnya karena hubungan tidak langsungnya tidak ada maka pembahasan terkait hal ini tidak dilanjutkan lagi.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini merupakan satu studi mengenai analisa belanja daerah yang di proksikan dalam ratio belanja terhadap PDRB, ratio belanja modal, dan ratio pertumbuhan belanja dan menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Dari pengujian yang dilakukan ratio belanja terhadap PDRB, dan

ratio pertumbuhan belanja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ratio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dari hasil uji statistik terlihat bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan begitu juga dengan belanja daerah tidak ditemukan pengaruh tidak langsung antara belanja daerah dengan pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfranca, Oscar And Miguel-Angel Galindo, 2003. Public Expenditure, Income Distribution, and Growth in OECD Countries, IAER: May 2003, Vol. 9, No. 2
- Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu
- David de la Croix, Thomas Lindh dan Bo Malmberg, 2008. Swedish economic growth and education since 1800, Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique, Vol. 41, No. 1February / février 2008
- Devarajan, S., Swaroop, V. and Zou, H.1996. 'The Composition of Public Expenditure and Economic Growth', Journal of Monetary Economics, Vol. 37, pp. 313–344
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Osborn, D.R 2007. Public Expenditure And Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing Countries, The Manchester School Vol 75 No. 5 September 20071463–6786 533–556
- Puji Wibowo, 2008. Mencermati Dampak desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah, Jurnal keuangan publik vol 5 no 1.
- United Nations Development Programme (UNDP), 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007, Bridge (Building And Reinventing Decentralised Governance)